

PRESS RELEASE  
**14<sup>th</sup> Annual Conference**  
**Asia-Pacific Tax Forum**

Rabu, 3 Mei 2023  
Aryaduta Hotel  
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48 Jakarta, Indonesia

Konferensi tahunan Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-14 pada Rabu, 3 Mei 2023 yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan *Malaysian Association of Tax Accountants* (MATA) dibuka oleh sambutan dari Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti yang mengemukakan pentingnya kerjasama internasional yang efektif untuk merespon krisis dalam rangka memperluas ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak, pencegahan penghindaran pajak dan kebocoran arus keuangan ilegal untuk mencapai kondisi perpajakan yang adil dan merata di setiap kegiatan ekonomi di tingkat global. Pada saat yang sama, pemerintah di kawasan perlu menyeimbangkan tujuan pendapatan dengan kondisi yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pada kesempatan ini pula Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti mengemukakan bahwa Pandemi Covid-19 mengubah perpajakan dalam 3 cara. Pertama, pajak berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian bantuan langsung tunai. Pajak mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pajak progresif. Kedua, saat ekonomi dunia pulih, perpajakan juga akan berperan. Meskipun banyak dukungan, baik dalam bentuk bantuan keuangan internasional langsung maupun dalam bentuk keringanan utang, peningkatan kapasitas perpajakan tetap diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat mendukung pembangunan. Ketiga, transparansi, termasuk pemantauan pendapatan domestik, bantuan dan pengeluaran, keduanya akan menjadi sangat penting. Bagi kelompok negara ini, upaya substansial untuk membangun kapasitas pajak merupakan inti dari strategi pembangunan yang ditujukan untuk mencapai SDGs.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan bahwa Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan paska pandemi. Di dalam negeri, Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi kebijakan di bidang ekonomi untuk bangkit pulih paska pandemi dengan dikeluarkannya Undang Undang Cipta Kerja, Undang Undang Hubungan Keuangan Pusat dan

Daerah, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus mendorong upaya hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.



Poto dokumen INDEF: (dari kiri ke kanan) Pendiri INDEF-Prof Didik J Rachbini, Wakil Presiden Republik Indonesia-Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, Direktur Program INDEF-Dr Esther Sri Astuti.

Pada kesempatan ini juga, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indonesia memiliki peluang yang besar di tingkat global untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hingga saat ini kontribusi ekonomi dan keuangan syariah mencapai 25% ekonomi nasional. Selain itu *islamic government bond* sudah banyak berperan untuk membiayai pembangunan nasional.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Zakat memiliki fungsi yang sama dengan pajak saat ini. Potensi pemungutan pajak yang besar di Indonesia perlu



diselaraskan dengan pajak dalam bingkai keadilan ekonomi agar dapat mengurangi kersnejangnan dan kemiskinan.

Setelah menyampaikan pidatonya, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kemudian resmi membuka acara Konferensi tahunan Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-14 dengan memukul gong sebagai simbolisasi.



Poto dokumen INDEF: (dari kiri ke kanan) Direktur Program INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)-Dr Esther Sri Astuti; President ITIC (International Tax and Investment Center)-Daniel Witt; Pendiri INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)-Prof Didik J Rachbini, Wakil Presiden Republik Indonesia-Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin resmi membuka acara 14th Annual Conference Asia-Pacific Tax Forum 2023 dengan memukul gong.

*Keynote speech* kemudian disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia dan Suryo Utomo – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN Republik Indonesia menyampaikan peran BUMN

sebagai *value creator* dan *agent of development* telah memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. BUMN di Indonesia mengembangkan 5 strategi untuk reformasi dan transformasi BUMN untuk meningkatkan kinerjanya sebagai *value creator* dan *agent of development*. Bentuk kontribusi BUMN adalah 60 persen dalam bentuk pajak, dalam bentuk PNPB sebesar 29 persen, dan dalam bentuk dividen sebesar 11, dengan kecenderungan sumbangan pajak meningkat setiap tahunnya. BUMN yang menjadi penyumbang terbesar dalam bentuk pajak adalah Pertamina, Telkom, PLN, Mandiri, BRI, BNI, SIG, Mind id, Pupuk Indonesia, dan Wika. BUMN melakukan implementasi integrasi data pajak di antara bumh.

Sementara itu, Suryo Utomo – Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam *keynote speech*-nya menyampaikan mengenai kondisi secara umum penerimaan perpajakan Indonesia yang membaik. Selain itu juga Pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diantaranya mengatur pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, pajak karbon, dan cukai. Melalui kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong penerimaan perpajakan di Indonesia. Pemerintah juga mendukung pertumbuhan industri dengan insentif pajak yang ditawarkan. Dalam kerangka global, Indonesia mendukung 2 pillar solution untuk digitalisasi, dalam kerangka inklusif melalui G20.

Diskusi panel Rabu, 3 Mei 2023 menghadirkan pembicara dari berbagai negara dan institusi: World Bank, ADB, International Tax and Investment Center (ITIC), APINDO, Senate of the Philippines, Ministry of Finance Sri Lanka, The M Group Inc., UN Transfer Pricing Manual, Ministry of Finance Indonesia, OECD, MoF Taiwan, Ministry of Finance Malaysia, University of Melbourne, Amazon, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, independent expert, INDEF, CECWG-ASEAN, Freeport, dan Pertamina.

Topik diskusi panel pada Rabu, 3 Mei 2023 adalah:

1. Fiscal Reforms in The Asia Pacific Region

Jose Antonio Tan III-Direktur Departemen Asia Tenggara Asian Development Bank mengungkapkan bahwa prospek 2023 membaik untuk Asia-Pasifik meskipun banyak tantangan yang muncul. Keseimbangan fiskal di Asia-Pasifik bergerak ke arah yang lebih baik dan pengetatan moneter diekspektasikan akan melambat. Sementara itu harga komoditas diperkirakan akan tetap tinggi. Hal ini juga diikuti dengan perkembangan inflasi yang moderat dan bergerak ke masa sebelum pandemi. Jose Antonio juga menyampaikan dibukanya ekonomi China ditambah dengan permintaan domestik yang sehat di tempat lain di kawasan Asia-Pasifik akan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.

Terdapat beberapa tantangan yang dikemukakan Jose Antonio yaitu: 1.Pembukaan kembali di RRC dapat menyebabkan *rebound* yang lebih cepat dari perkiraan; 2.Disinflasi



di AS dan ekonomi maju lainnya dapat memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, memperpanjang sikap moneter yang ketat; 3. Suku bunga dan utang yang lebih tinggi telah meningkatkan risiko stabilitas keuangan seperti yang terlihat dalam gejolak perbankan baru-baru ini di AS dan Eropa; 4. Eskalasi invasi Rusia ke Ukraina dapat memperbaharui tantangan ketahanan energi dan pangan serta menghidupkan kembali tekanan inflasi; dan 5. Tantangan lainnya termasuk perpecahan global dan perubahan iklim.

Sementara itu dari sisi perpajakan Jose Antonio menyoroti rata-rata rasio pajak kawasan ASEAN yang masih dibawah 15%, padahal Negara berkembang harus memiliki rasio pajak terhadap PDB minimal 15%, untuk memastikan mereka memiliki uang yang diperlukan untuk berinvestasi di masa depan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, ADB memberikan dukungan pada ASEAN mencakup tiga bidang kebijakan dan kapasitas pajak: (i) kebijakan dan legislasi pajak; (ii) modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan; dan (iii) peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan administrator pajak. Selain itu mendorong *Asia Pacific Tax Hub*, pajak untuk mobilisasi sumber daya domestik (DRM) dan kerja sama pajak internasional (ITC) akan berfungsi sebagai platform terbuka dan inklusif untuk: dialog kebijakan strategis, berbagi pengetahuan, dan koordinasi pembangunan antara negara anggota ADB, mitra pembangunan, dan ADB.

Marcello Esteveo dari Bank Dunia menyampaikan bahwa berbagai krisis memiliki dampak fiskal langsung dan siklus yang besar. Lebih jauh menurut Marcello, pertumbuhan yang lebih rendah akan menyebabkan perlambatan pemulihan fiskal, terutama untuk negara berpenghasilan rendah, inflasi meningkatkan penerimaan pendapatan nominal tetapi menggerus pendapatan riil dan profitabilitas investasi dalam jangka menengah. Nilai riil utang dapat menurun tetapi bergantung pada banyak faktor. Beban subsidi bahan bakar fosil meningkat tajam di tahun 2021 dan baru meningkat lagi di tahun 2022. Dampak langsung krisis terjadi pada peningkatan harga barang-barang pertanian dan peningkatan suku bunga.

Marcello mengatakan bahwa reformasi pengeluaran pajak dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan hasil pembangunan. Merampingkan pengeluaran pajak yang tidak efektif dapat (i) menyederhanakan sistem pajak, (ii) meningkatkan lebih banyak pendapatan (atau pendapatan yang sama dengan tarif pajak yang lebih rendah), dan (iii) meningkatkan progresivitas dan efisiensi. Sementara itu Pajak Minimum Global mendorong rasionalisasi pengeluaran pajak dengan memberikan hak perpajakan kepada negara pengekspor FDI jika pajak CIT yang efektif terlalu rendah.

Marcello mengungkapkan bahwa negara-negara Asia Timur kehilangan pendapatan pajak dalam jumlah besar karena gagal menerapkan peraturan PPN saat ini untuk layanan

digital. Dampak COVID-19 sangat dramatis pada ekonomi digital; potensi pajak meningkat pesat dengan pergeseran permintaan ke bisnis platform. Potensi pajak dari ekonomi digital juga dapat dibatasi oleh aturan pajak kuno.

## 2. Wider Stakeholder Community In Tax Reforms

Atty Sidhartha Felice Mae O. Garcia - Committee Director, Ways and Means Committee, Senate of the Philippines mengungkapkan bahwa Filipina berusaha untuk menciptakan sistem yang memberikan kemudahan bagi *tax prayer*. Mereka membuat tagihan yang dapat memudahkan *tax prayer* yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Atty Sidharta, reformasi pajak tidak hanya sebatas pada meningkatkan pajak, tetapi juga efisiensi dari sistem perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan negara.

Siddi Widyapratama-Head of Taxation Committee, the Indonesian Employers Association (APINDO) mengemukakan bahwa APINDO bersama dengan Indonesia Chambers telah melakukan komunikasi dua arah dengan pemerintah. Komunikasi yang dilakukan terkait dengan insentif pajak dan bagaimana pemerintah dapat mendapatkan pendapatan pajak. Sementara itu Sri Lanka menurut Dr.Kapila Senanayake, Director General, Department of Fiscal Policy, Ministry of Finance, Sri Lanka, program pemotongan pajak membuat rasio pajaknya turun sangat rendah ke 8 persen. Sehingga pada tahun 2019 Sri Lanka mengalami masalah karena tidak adanya pendapatan. Oleh karena itu Sri Lanka perlu meningkatkan pendapatan. Saat ini Sri Lanka sudah meningkatkan VAT, pajak perusahaan, dan lain-lain. Lebih jauh Kapila mengungkapkan bahwa reformasi yang dilakukan menyakitkan, tapi jika pendapatan membuahkan hasil dengan pendapatan pajak yang meningkat dari tahun lalu. Kapila menambahkan bahwa penting untuk memiliki *tax policy* dan *tax administration* yang berkualitas.

## 3. Global Developments in Corporate Taxation Emerging Guidance From The Inclusive Framework And The United Nations

Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D. (Minister of Finance Indonesia 2014-2016) menuturkan bahwa pajak penghasilan badan bergantung pada laba dan ada siklus bisnis. Globalisasi baik untuk ekonomi karena Anda dapat memasarkan barang dan jasa Anda dengan harga yang kompetitif. Di sektor keuangan tidak ada batasan dalam globalisasi dan ada pajak yang akan melayani dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks global lebih jauh lagi Bambang menuturkan perlunya regulator untuk mengatur komunitas pajak global. Kerjasama antar negara diperlukan untuk memerangi penggelapan dan melindungi integritas sistem perpajakan.

Melinda Brown-Senior Tax Expert, OECD menuturkan bahwa *two pillar solution* sangat relevan untuk diimplementasikan. Selain itu dibutuhkan juga kerjasama dan inklusivitas berbagai pihak untuk menyukseskan implementasi pillar solution.

Mekar Satria Utama - Director, International Tax, Directorate General of Taxes, Ministry of Finance, Indonesia menyampaikan sejauh mana Indonesia dalam mengimplementasikan pillar 1 dan pillar 2. Menurutnya, beberapa isu masih dibahas, pilar dua dapat diterapkan, tapi untuk pilar satu perlu menunggu jika saat ini sudah ada konsensus.

Sementara itu di Taiwan menurut Ling Mao Wang- Executive Officer Directorate general of taxation, Taxation Administration, MoF, Taiwan, telah menghapuskan salahsatu insentif pajak seiring dengan adanya perubahan pada manufaktur.

#### 4. Current Issues of Concern in GST/VAT

Michael Evans - University of Melbourne mengungkapkan bahwa VAT kemungkinan akan tetap menjadi andalan sistem pajak di Asia yang sedang berkembang dan oleh karena itu harus dioptimalkan. Tantangan untuk VAT adalah : 1. Terjadi penurunan persenan VAT terhadap GDP. Hal ini dikarenakan fundamental desain dari VAT; 2. *Cross border* VAT sehingga sulit untuk ditarik pajak. Jasa Keuangan, secara teoritis margin implisit yang diperoleh lembaga keuangan harus dikenakan PPN, tetapi sulit untuk VAT melakukan itu.

Stephanie Sweet - Senior Manager, International Public Policy (Tax), Amazon mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran peraturan digital VAT/GSV kebijakan yang diambil dianjurkan agar konsisten dengan *international best practice* , dan mengajak semua stake holder. Tidak hanya itu, saat merubah kebijakan VAT, perlu dipikirkan juga bagaimana dampaknya ke *small business* karena perubahan kebijakan itu kompleks. Seperti di Amazon, banyak sekali small bisnis yang bertransaksi di platform Amazon, jadi saat terjadi perubahan perlu diedukasi.

Yon Aرسال - Expert Staff for Tax Compliance, Ministry of Finance Indonesia mengungkapkan bahwa VAT memiliki peran penting dalam pendapatan Indonesia. VAT di Indonesia meningkat karena perlu meningkatkan pendapatan.

Dr. Md. Taufiq bin Md. Ralip - MoF, Malaysia mengungkapkan bahwa Malaysia tidak ada GST akan menerapkan *luxury tax* tahun ini.

#### 5. Design of Structured, Risk Sensitized Excise Regime For Harmful Good

Prof. Zuraeda Ibrahim – Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia membagikan hasil penelitiannya yaitu Perpajakan Tidak Langsung: Penanganan Cukai Diferensial Berdasarkan Tingkat Persepsi Bahaya Produk Rokok dan Alternatifnya dan salah satu temuannya adalah kebijakan pengendalian tembakau yang paling efektif dilaksanakan adalah kebijakan Pemantauan dan pencegahan penggunaan tembakau.

Sementara itu, Elizabeth Allen – former HMRC UK senior official and independent expert mengemukakan bahwa produk, layanan, dan selera konsumen berkembang sehingga sistem cukai perlu dimodernisasi untuk mendorong inovasi. Cukai berperan penting keberlanjutan penerimaan pajak dan mendorong industri untuk menghasilkan produk



yang tidak terlalu berbahaya (misalnya, produk tembakau/nikotin, kendaraan hibrida atau elektrik sepenuhnya.)

Lebih jauh Allen mengemukakan manfaat dari kebijakan cukai bagi stakeholder terkait. Bagi konsumen, kebijakan cukai diferensial dapat mendorong konsumen untuk membuat pilihan yang lebih baik (misalnya, Kendaraan Listrik vs. Kendaraan yang mengkonsumsi bahan bakar). Untuk produsen, tarif pajak yang berbeda untuk produk dan layanan dengan eksternalitas yang berbeda dapat memberi insentif, mendorong penelitian dan inovasi, serta mendorong keputusan produksi produk yang kurang berbahaya (misalnya, cukai diferensial untuk minuman manis atau minuman beralkohol di Inggris).

Untuk mempertahankan pendapatan pajak pemerintah, terdapat peluang untuk meningkatkan tingkat pajak secara maksimal untuk produk dan layanan berbahaya, sembari memberikan pajak yang lebih rendah atau tanpa pajak untuk produk dan layanan yang kurang berbahaya

Allen juga menyampaikan bahwa terdapat peluang untuk memperkenalkan pajak baru atas produk/jasa yang dianggap berbahaya bagi kesehatan atau terhadap lingkungan misal produk makanan yang mengandung kadar gula tinggi, transportasi udara, TPA dll Sementara itu Furiman Hattar, Chair, CECWG, ASEAN menyatakan sepakat dengan Allen. Pada praktiknya di Malaysia, menjaga perbatasan yang perbatasan yang Panjang secara optimal masih belum dapat dilakuakn sehingga masih terdapat barang masuk secara ilegal, seperti misalnya pada rokok ilegal.

Esther dari INDEF mengungkapkan bahwa Pigovian Tax adalah pajak untuk hmengurangi produk berbahaya. Pajak tersebut diterapkan untuk mengurangi eksternalitas negatif. Dr. Esther Sri Agustin, Director of Research at INDEF membagikan hasil penelitian INDEF terkait hal ini, terdapat *direct* dan *indirect cost*. *Direct cost*, misal dengan merokok lalu sakit akhirnya harus mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit. *Indirect cost*, seperti *mortality cost*. Sehingga, jika kita tidak bisa control *smoking behaviour* maka kita akan dalam bermasalah karena *economic burnden* akan semakin meningkat. Rekomendasi kami, kita harus menerapkan cukai yang lebih rendah pada *harm reduction product*. Misalnya cukai *electric ciggarate* perlu lebih rendah dari *conventional ciggarate*.

## 6. Taxation of The Extractive and Energy Sectors

Paul Cornelius-Grant Thornton, Mukhlis Ishak-Vice President Tax PT Freeport Indonesia dan Eko Haryadi-Pertamina mendiskusikan tentang perpajakan pada sektor sumberdaya ekstraktif dan energi. Paul dan Mukhlis menuturkan bahwa pentingnya stabilisasi pajak pada sektor ini. Mukhlis mengatakan bahwa sektor ini memiliki beban yang banyak atas pajak. Eko menambahkan bahwa sektor ini penuh dengan ketidakpastian terutama terkait harga sehingga butuh insentif fiskal selain pajak.



# ASIA- PACIFIC TAX FORUM



Asia-Pacific  
Tax Forum

3-4 May 2023 | Jakarta, Indonesia

**INDEF** | Institute for Development  
of Economics and Finance



Pada kesempatan diskusi, para panelis berbagi mengenai praktik perpajakan secara umum terutama di Kawasan Asia Pasifik dan secara khusus di negara-negara di Kawasan Asia Pasifik. Panelis mendiskusikan implementasi Solution Pillar 1 dan Pillar 2 yang mulai diadaptasi di beberapa negara dan bagaimana implementasinya di negara lainnya. Pentingnya kerjasama antar negara dalam perpajakan ditekankan guna menekan penghindaran pajak sehingga pendapatan pajak negara bisa meningkat ditengah keterbatasan fiskal yang dialami negara-negara paska pandemi Covid-19. Selain itu dibahas juga mengenai pentingnya peran institusi dan regulasi pada kerjasama antar negara dalam perpajakan.